



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NOMOR : 445 / 03351a / II / 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN YANG DIGUNAKAN
DI RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas administrasi dan pengorganisasian, maka dipandang perlu dibuat kebijakan Perundang-undangan dan Peraturan yang digunakan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 1996 Tentanga Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 159b/Men.Kes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
8. Peraturan Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Peyunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
13. SK Menkes RI No. 436/Menkes/K/VI/1993 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik;
14. SK Menkes RI No. 1333/Menkes/SK/XII/1999 tanggal 8 Desember 1999 tentang Penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik.
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Perundang-undangan dan Peraturan yang digunakan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KEDUA : Perundang-undangan dan Peraturan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 6 Februari 2015
Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo



Tembusan kepada Yth :

1. Para Pejabat Struktural/Fungsional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
2. Peringgal _____

Lampiran Surat Keputusan Direktur
Nomor : 445 / 03351a / II / 2015
Tentang Kebijakan Perundang-undangan
yang digunakan di RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo Purwokerto

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN
YANG DIGUNAKAN DI RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NO.	URAIAN	NOMOR / TAHUN	TENTANG
1	UNDANG - UNDANG	NO. 29 TAHUN 2004	PRAKTEK KEDOKTERAN
2	UNDANG - UNDANG	NO. 40 TAHUN 2004	SISTEM JAMINAN SOSIAL
3	UNDANG - UNDANG	NO. 11 TAHUN 2008	INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
4	UNDANG - UNDANG	NO. 36 TAHUN 2009	KESEHATAN
5	UNDANG - UNDANG	NO. 44 TAHUN 2009	RUMAH SAKIT
6	UNDANG - UNDANG	NO. 24 TAHUN 2011	BADAN PENYELENGGARA BPJS
7	UNDANG - UNDANG	NO. 38 TAHUN 2014	KEPERAWATAN
8	PP	NO.23 TAHUN 2004 JO NO.74 TAHUN 2012	PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
9	PP	NO.101 TAHUN 2012	PENERIMAAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
10	PERPRES	NO.12 TAHUN 2013	JAMINANAN KESEHATAN BPJS
11	PERMENDAGRI	NO. 61 TAHUN 2007	PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
12	PERMENKES	NO. 129/MENKES/SK/II/2008	STANDAR PELAYANAN MINIMAL
13	PERMENKES	NO. 1014/MENKES/SK/XI/2008	STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK
14	PERMENKES	NO. 755 TAHUN 2011	KOMITE MEDIS
15	PERMENPAN	NO. 15 TAHUN 2014	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN
16	PERMENKES	NO.56 TAHUN 2014	KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT
17	PERMENKES	NO. 58 TAHUN 2014	STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN
18	PERMENKES	NO.83 TAHUN 2014	STANDAR UNIT TRANSFUSI DARAH, BANK DARAH DAN JEJARING UTD
19	PERDA PROV. JATENG	NO. 8 TAHUN 2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD DAN RSJD PROVINSI JAWA TENGAH
20	PERDA PROV. JATENG	NO. 1 TAHUN 2009	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
21	PERDA PROV. JATENG	No. 1 TAHUN 2011	RETRIBUSI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
22	PERGUB JATENG	NO. 94 TAHUN 2008	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN TATA KERJA RSUD DAN RSJD PROVINSI JAWA TENGAH
23	PERGUB JATENG	NO. 20 TAHUN 2009	TARIF PRAKTIK, MAGANG, PENELITIAN DAN STUDY BANDING BAGI SISWA/MAHASISWA/KARYAWAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
24	PERGUB JATENG	NO. 96 TAHUN 2010	REMUNERASI PADA PPK BLUD RSUD DAN RSJD PROVINSI JAWA TENGAH
25	PERGUB JATENG	NO. 27 TAHUN 2011	PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
26	PERGUB JATENG	NO. 1 TAHUN 2012	JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PPK BLUD RSUD DAN RSJD
27	PERGUB JATENG	NO. 29 TAHUN 2012	TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
28	PERGUB JATENG	NO. 52 TAHUN 2013	TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RSUD DAN RSJD
29	PERGUB JATENG	NO. 55 TAHUN 2013	TATA CARA PENGADAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD NON PNS TIDAK TETAP PADA RSUD DAN RSJD PROVINSI JAWA TENGAH

30	PERGUB JATENG	NO. 79 TAHUN 2014	PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD TA. 2014
31	PERGUB JATENG	NO. 45 TAHUN 2014	KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
32	PERGUB JATENG	NO. 050/ 28 TAHUN 2014	RENCANA STRATEGIS SETAHUN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018
33	PERGUB JATENG	NO. 60 TAHUN 2014	STANDARISASI BIAYA DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PROVINSI JAWA TENGAH
34	PERGUB JATENG	NO. 25 TAHUN 2014	PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT HOSPITAL BY LAWS RSUD. PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
35	PERGUB JATENG	NO. 5 TAHUN 2015	JASA PELAYANAN
36	PERGUB JATENG	NO. 9 TAHUN 2015	TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI
37	KEPMENKES	NO. 1427/MENKES/SK/XII/2006	STANDAR PELAYANAN RADIOTERAPI
38	KEPMENKES	NO.1239/ MENKES/SK/XII/2006	REGISTRASI DAN PRAKTIK PERAWAT
39	KEPMENKES	NO. 374/MENKES/SK/III/2007	STANDAR PROFESI GIZI
40	KEPMENKES	NO. 378/MENKES/SK/IV/2008	PEDOMAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIK
41	KEPMENKES	NO. 269 TAHUN 2008	REKAM MEDIK

**DAFTAR PEDOMAN YANG DIGUNAKAN
DI RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO**

NO	PEDOMAN
1	PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI CUCI DAN PENCUCI HAMA (ICPH) TAHUN 2015
2	PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI CUCI DAN PENCUCI HAMA (ICPH) TAHUN 2015
3	PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA TAHUN 2015
4	PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA TAHUN 2015
5	PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI RADIOTERAPI TAHUN 2015
6	PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RADIOTERAPI TAHUN 2015
7	PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK TAHUN 2015
8	PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK TAHUN 2015
9	PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH INSTALASI PENYEHATAN LINGKUNGAN RS TAHUN 2015
10	PEDOMAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INSTALASI PENYEHATAN LINGKUNGAN RS TAHUN 2015
11	PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI PENYEHATAN LINGKUNGAN RS TAHUN 2015
12	PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI PENYEHATAN LINGKUNGAN RS TAHUN 2015
13	PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI GIZI TAHUN 2015
14	PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI KENDARAAN DINAS TAHUN 2015
15	PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI KENDARAAN DINAS TAHUN 2015
16	PEDOMAN PENGORGANISASIAN BAGIAN KEUANGAN
17	PEDOMAN PENGORGANISASIAN BAGIAN PERENCANAAN
18	PEDOMAN PENGORGANISASIAN BAGIAN UMUM
19	PEDOMAN PENGORGANISASIAN BAGIAN REKAM MEDIS
20	PEDOMAN PENGORGANISASIAN BAGIAN PROGRAM
21	PEDOMAN PENGORGANISASIAN BAGIAN MONEV
22	PEDOMAN PENGORGANISASIAN BAGIAN TATA USAHA
23	PEDOMAN PENGORGANISASIAN BAGIAN RUMAH TANGGA
24	PEDOMAN PENGORGANISASIAN BAGIAN ORPEG
25	PEDOMAN PENGORGANISASIAN PELAYANAN KEPERWATAN
26	PEDOMAN PRAKTEK KLINIK BEDAH
27	PEDOMAN PRAKTEK KLINIK OBGYN
28	PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

29	PEDOMAN PENGORGANISASIAN PONEK INSTALASI RAWAT INAP I
30	PEDOMAN PELAYANAN PONEK 1
31	PEDOMAN PELAYANAN PONEK 24 JAM
32	PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN
33	PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI RAWAT JALAN
34	PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN II
35	PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI RAWAT JALAN II

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 6 Februari 2015
Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Purwokerto



(HARYADI IBNU JUNAEDI)

DAFTAR KEBIJAKAN 2015 RSUD PROF.Dr.MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NO	JUDUL	TANGGAL
1	KEBIJAKAN MEKANISME / TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI RSMS	31-Mar-15
2	KEBIJAKAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT DI RSMS	31-Mar-15
3	KEBIJAKAN UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ)	14-Jul-15
4	KEBIJAKAN PELAYANAN FARMASI DI RSMS	1-Apr-15
5	KEBIJAKAN KEPASTIAN TEPAT LOKASI, PROSEDUR DAN PASIEN OPERASI	1-Apr-15
6	KEBIJAKAN RAPAT KOORDINASI LINGKUP PEJABAT STRUKTURAL	12 Mei 15
7	KEBIJAKAN RAPAT KOORDINASI LINGKUP WADIR PELAYANAN DAN KERJASAMA DI RSMS	30-Jul-15
8	KEBIJAKAN PENETAPAN DOKTER YANG BERWENANG MENULIS RESEP DI RSMS	1-Jul-15
9	KEBIJAKAN CUTI DAN IZIN BAGI PNS DAN NON PNS RSMS	2-Sep-15
10	KEBIJAKAN SAFETY BRIEFING DAN PENYEDIAAN TEMPAT EVAKUASI DI RSMS	16-Jul-15
11	KEBIJAKAN JAM KUNJUNGAN DI RSMS DAN PAVILIUN ABIYASA	19-Jun-15
12	KEBIJAKAN TATA CARA TENTANG PENGAJUAN KEBERATAN PELAYANAN PUBLIK RSMS	5-Jan-15
13	KEBIJAKAN PERUBAHAN REGULASI RUMAH SAKIT	3-Jan-15
14	KEBIJAKAN KARTU TUNGGU PASIEN RAWAT INAP RSMS	9-Sep-15
15	KEBIJAKAN PEMBINAAN PEGAWAI DI RSMS	2 Des 15
16	KEBIJAKAN PEMBAGIAN TUGAS SUB BAGIAN RUMAH TANGGA, INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT DAN INSTALASI PENYEHATAN LINGKUP DI RSMS	31 Des 15
17	KEBIJAKAN KUALIFIKASI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	2-Nov-15
18	KEBIJAKAN PENETAPAN KRITERIA SANKSI KESALAHAN INPUT DATA TRANSAKSI BILLING PASIEN	2-Nov-15
19	KEBIJAKAN PELAYANAN KEROHANIAN DI RSMS	2-Nov-15
20	KEBIJAKAN MELAKUKAN KAJIAN TEKNOLOGI DAN KETERSEDIAAN FARMASI YANG AKAN DIGUNAKAN DI RSMS	5-Jan-15
21	KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) DI RSMS	1-Jul-15
22	KEBIJAKAN PELAYANAN TRANSFUSI DARAH DI RSMS	25-Apr-15
23	KEBIJAKAN ROTASI MUTASI PEGAWAI	2-Jan-15
24	RETENSI KEBIJAKAN DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) DI RSMS	6-Jan-15

25	KEBIJAKAN EVALUASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	1-Nov-15
26	KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA KUNCI INDIVIDU (KEY PERFORMANCE INDEX)	2 Mei 16